

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi memiliki artian yang sangat luas berikut beberapa pengertian ekonomi yang penulis pilih untuk melengkapi penelitian ini. Menurut Sukirno (2011:113) pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian sebagai berikut:

pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (2014:144) dijabarkan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Sedangkan pengertian lain mengenai pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets dalam Purnamasari (2010:44):

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

2.1.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor produksi yang merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi.

Menurut Sukirno (2011:332) terdapat lima faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya

alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak dapat membangun dengan cepat.

2. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanla manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

3. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi dan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya,

dan politik juga memiliki arti penting didalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Tingkat ketergantungan pada sektor primer
2. Peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur
4. Kualitas sumber daya manusia
5. Tabungan masyarakat
6. Belanja pemerintah daerah

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:335), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai berikut:

1. Teori Sollow Swan
 Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.
2. Teori Harrod-Domar
 Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (*steady growth*). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut:
 - a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh.
 - b. Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
 - c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasiona, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
 - d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal- output (*capital output ratio = COR*) dan rasio antara penambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*)

2.1.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Rahardjo (2014:91), bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakseimbangan Pendapatan
 Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan.
- b. Perubahan Struktur Perekonomian
 Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.
- c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja
 Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).
- d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan
 Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya

mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Alokasi pengeluaran masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kesejahteraan masyarakat:

1. Komposisi pendapatan nasional

Dua masyarakat dengan pendapatan per kapita yang sama, tingkat kesejahteraannya akan sangat berbeda apabila komposisi produksi nasionalnya sangat berlainan. Suatu masyarakat akan mengecap tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh pendapatan per kapitannya apabila proporsi pendapatan nasional yang berupa pengeluaran untuk pertahanan dan untuk pembentukan modal lebih tinggi dari pada di Negara lain yang sama pendapatan per kapitannya.

2. Perbedaan masa lapang

Ketidaktepurnaan pendapatan per kapita sebagai alat pembandingan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari perbedaan masa lapang yang dinikmati berbagai masyarakat. Pendapatan per kapita meningkat maka berbanding terbalik dengan masa lapang yang mereka rasakan. Kesejahteraan terjadi apabila masa lapang dan pendapatan berbanding lurus.

3. Keadaan pengangguran

Di samping menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, tujuan penting lain dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bukan saja harus sanggup mengurangi tingkat pengangguran.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah diperlukan berbagai indikator pengukuran. Menurut BPS Sumatera Selatan (2018:3), “Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara umum semakin tinggi nilai PDRB berarti semakin tinggi nilai output yang tercipta dalam wilayah tersebut”.

Menurut Waridah (2017:69), “Domestik adalah sesuatu mengenai atau berhubungan dengan permasalahan dalam negeri”, sedangkan “Regional adalah bersifat daerah”. (Waridah, 2017:233). Rahmawati (2017) mengatakan, “Produk Domestik Regional Bruto diartikan sebagai total output yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah”. Dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan semua jumlah nilai barang dan jasa akhir dari seluruh kegiatan ekonomi pada wilayah/daerah yang bersangkutan (BPS Sumatera Selatan, 2018:3).

Menurut BPS Sumsatera Selatan (2018:3), salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku
Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.
- b. PDRB atas dasar harga konstan
Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Dalam Publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini. Putri (2018:21-22), mengatakan bahwa PDRB dapat diukur melalui tiga pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Perhitungan PDRB keseluruhan dari nilai produk barang-barang dan jasa akhir dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 17 sektor lapangan usaha, yaitu: 1.Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2.Pertambangan dan Penggalian; 3.Industri Pengolahan; 4.Pengadaan Listrik dan Gas; 5.Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7.Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8.Transportasi dan Pergudangan; 9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10.Informasi dan Komunikasi; 11.Jasa Keuangan dan Asuransi; 12.Real Estate; 13.Jasa Perusahaan; 14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15.Jasa Pendidikan; 16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17.Jasa lainnya

2. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan PDRB untuk jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut, penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi merupakan bagian yang harus diperhitungkan PDRB.

3. Pendekatan Pengeluaran

Perhitungan dalam pendekatan pengeluaran untuk menghitung PDRB yang akan menghasilkan nilai jumlah pengeluaran dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak lainnya atas produksi neto. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sumatera Selatan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, Lembaga Non Propit Rumah Tangga (LNPRRT), dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggara (2016:325-326) pendapatan daerah dijelaskan dalam pengertian yang cukup luas sebagai berikut:

Pendapatan daerah merupakan sejumlah uang yang diterima oleh daerah, baik yang berasal dari hasil usahanya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lain yang sah. Struktur pendapatan daerah terdiri atas: Pertama, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain yang sah (misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, atau pun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa). Kedua, dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil atau DBH (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi), dana alokasi umum atau DAU yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri, dan dana alokasi khusus atau DAK. Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dan bantuan dari daerah di atasnya atau daerah lain.

Sedangkan dalam penjelasan yang berbeda Anggara (2016:340) juga menjelaskan bahwa:

Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah mendasarkan pada prinsip bahwa pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup. Permasalahan keuangan daerah, antara lain kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*), sedangkan kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pengelolaan potensi daerah menentukan PAD atau kemandirian keuangan daerah. Penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban obyek, dan pemberlakuan sistem denda bagi penunggak merupakan upaya intensifikasi, sedangkan menambah sumber pendapatan baru merupakan upaya ekstensifikasi.

Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari penerimaan pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang berlaku, seperti jumlah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, investasi, dan jumlah pengeluaran pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD, Berikut ini yang merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Prinsip-prinsip pengenaan pajak daerah berdasarkan kriteria Smith atau dikenal dengan SMITH'S CAN-ON yaitu: Keadilan (*equity*), bahwa pengenaan beban pajak harus adil.
2. Kenyamanan (*convience*), bahwa pembayaran pajak merupakan hal yang menyenangkan bagi wajib pajak.
3. *Ability to Pay* bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan bayarnya.
4. Efisien dan ekonomis bahwa penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya atau ongkos pungut (CCER= cost collection efficiency ratio yaitu total penerimaan pajak dibandingkan dengan upah pungut). Kemudian fungsi ekonomi pajak daerah yaitu:
 - a. Fungsi penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak dikumpulkan untuk mengumpulkan penerimaan Negara/ daerah dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah.
 - b. Fungsi pengaturan (*regulator*), yaitu pajak dikenakan untuk mengatur transaksi ekonomi yang terkait dengan objek pajak.
 - c. Fungsi distribusi, yaitu ketika pajak dikenakan dalam rangka pemerataan pendapatan antar warga masyarakat. (www.djpk.kemenkeu.go.id, 2018)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Menerangkan, jenis pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Menurut beberapa sumber yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sejumlah dana atau sumber pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah melalui beberapa sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta penerimaan lain yang sah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Negara. Selain itu Pendapatan Asli Daerah juga mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain yang sah (misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah

dengan uang asing, komisi, potongan, atau pun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa).

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Dijelaskan didalam kamus istilah ekonomi, pengeluaran atau *expenditure* yaitu pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan, apabila dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap, pengeluaran tersebut disebut dengan pengeluaran modal. Jika pengeluaran untuk biaya operasi merupakan seluruh pengeluaran operasional disebut pengeluaran pendapatan, biaya tunai tersebut untuk mendapatkan barang, jasa, atau yang meningkatkan dalam pendapatan hasil usaha. Pengeluaran pemerintah diukur dari besarnya jumlah belanja daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, “belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, “belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, “belanja Negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah”. Jadi, dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis pengeluaran pemerintah, yaitu belanja pemerintah dan pengeluaran transfer. Pengeluaran dalam bentuk belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Khusus untuk keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah untuk dilakukan pengendalian sejak perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya adalah klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja, yaitu: Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah, dan bantuan sosial, Belanja Modal terdiri dari belanja tanah, belanja

peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan: belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, Belanja Lain-lain/Tidak Terduga dan Transfer.

Dalam menyusun LRA, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung”. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
4. Belanja Hibah
Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
5. Bantuan Sosial
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan

tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

6. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan berdasarkan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan/ atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ pengadaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan jasa.

Selain itu, menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 belanja diklasifikasikan menjadi seperti berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/ Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Bunga
- d. Subsidi
- e. Hibah
- f. Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/ atau mengadakan barang modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Selain itu pengeluaran pemerintah juga terdapat didalam bagian kelompok pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02. Firdaus, M Surya (2017:17) menjelaskan bahwa Klasifikasi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/ Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Ada lima macam Penerimaan Pembiayaan Menurut Mahmudi (2016:140) yang terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lainlain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- b. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

Selain penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan juga menjadi bahasan yang tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pembiayaan. Menurut Mahmudi (2016:143) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen non permanen. Investasi ini dapat berupa deposit berjangka, Pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, Penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.
- c. Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai arus keluar anggaran dana pemerintah yang dipergunakan dengan sebijak-bijaknya untuk keperluan kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan, apabila dilakukan untuk meningkatkan aktiva tetap, pengeluaran tersebut disebut dengan pengeluaran modal jika dilakukan untuk biaya operasi, pengeluaran tersebut disebut dengan pengeluaran operasional, biaya tunai tersebut untuk mendapatkan barang, jasa, atau hasil usaha. Selanjutnya pengeluaran pemerintah dapat disebut belanja Negara berdasarkan keperluan-keperluan pengeluaran sesuai dengan teori-teori yang telah dijelaskan.

2.1.4.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam mengambil keputusan mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Berikut dijelaskan macam-macam teori pengeluaran pemerintah menurut Sukirno (2011: 240) yaitu sebagai berikut:

1. Model Perkembangan Pengeluaran Pemerintah oleh Rostow dan Musgrave
Model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara

tahap awal, menengah, dan lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi-investasi swasta sudah semakin membesar. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

2. Teori Adolf Wagner

Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum. Hukum Wagner adalah sebagai berikut: “Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat”. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

3. Teori Peacock Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman merupakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Teori-teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah diatur dengan mempertimbangkan banyak aspek yang harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai dari pengeluaran yang telah dilakukan. Rostow dan Musgrave menjelaskan bahwa “pengeluaran

pemerintah berhubungan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, menengah, dan lanjut”, menurut Adolf Wagner “dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat”, serta menurut Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa “pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut”, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara.

Menurut teori dari ketiga sumber di atas dapat disimpulkan bahwa harus ada timbal balik dari pengeluaran pemerintah terhadap apa yang diterima masyarakat baik itu dari sisi perkembangan ekonomi, pendapatan per kapita ataupun kesadaran masyarakat bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu peran pemerintah dalam menyeimbangkan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan harus lebih di optimalkan misalnya penggalakan taat pajak bagi seluruh masyarakat serta peningkatan pemberdayaan sumber pemasukan daerah melalui wisata, budaya dan lain sebagainya.

2.1.5 Investasi

Menurut Tandelilin (2010:2), “investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang”. Pengertian Investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017) adalah:

Investasi merupakan suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

Sedangkan menurut Sukirno (2011:257) investasi dijelaskan sebagai berikut:

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam

perekonomian. Dengan kata lain, dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi adalah sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Investasi tersebut berupa bunga, royalti dan dividen dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas dana tersebut di masa yang akan datang.

2.1.5.1 Investasi Pemerintah

Pengertian investasi pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 adalah:

Penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Buana, dkk (2018:11-12) menjelaskan pengertian investasi dalam penjabarannya berikut ini:

Investasi merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara dengan bertumbuhnya ekonomi suatu Negara maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian dalam menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran, mesin-mesin dan alat-alat produksi, lembaga penelitian dan pengembangan, alat-alat transportasi dan komunikasi, dan masih banyak lagi. Untuk pengadaan semua itu maka diperlukan dana untuk membiayainya yang disebut dana investasi.

Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi

jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06 tahun 2016, investasi diklasifikasikan menjadi:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas. Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek Oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:

1. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara dan Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau

menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah.
2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008, Sumber dana Investasi

Pemerintah dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Keuntungan investasi terdahulu
3. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah
4. Sumber-sumber lainnya yang sah

Terdapat ruang lingkup pengelolaan investasi pemerintah yang dijelaskan di Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2008, yaitu:

1. Perencanaan
Perencanaan Investasi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perencanaan investasi oleh Badan Investasi Pemerintah dan perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN. Perencanaan investasi oleh Badan Investasi Pemerintah diatur dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan Investasi Pemerintah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Investasi Pemerintah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan Investasi Pemerintah dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan investasi. Perencanaan Investasi Pemerintah harus ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Pelaksanaan Investasi
Pelaksanaan Investasi Pemerintah dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan. Untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah dengan cara pembelian surat berharga, inisiatifnya dapat berasal dari Badan Investasi Pemerintah. Pelaksanaan Investasi Langsung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilakukan dengan cara kerjasama investasi Badan

Investasi Pemerintah dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*), selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*). Pelaksanaan Investasi Langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsekuensi logis bahwa peran pemerintah sebenarnya sebatas memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

3. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah. Akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan. Untuk Badan Investasi Pemerintah berbentuk satuan kerja, menyelenggarakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Investasi Pemerintah, Badan Investasi Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja badan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

4. Pengawasan

Sebagai pelaksanaan *check and balance* atas pengelolaan Investasi Pemerintah, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pengawasan yang meliputi pemantauan dan evaluasi. Fungsi pengawasan ini diharapkan menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) pada pengelolaan Investasi Pemerintah. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga dengan pengawasan tersebut diharapkan agar pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Divestasi

Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, peran Badan Investasi Pemerintah sebagai pelaku investasi, mempunyai maksud untuk memfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Pada prinsipnya investasi yang dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah akan berakhir melalui divestasi baik untuk Investasi surat berharga maupun untuk Investasi Langsung. Divestasi terhadap surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Badan Investasi Pemerintah untuk investasi berikutnya yang lebih

menguntungkan. Sedangkan divestasi atas Investasi Langsung dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat.

Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi, yaitu entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 06 (revisi 2016) biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Indikator Investasi Pemerintah terdapat di APBD Provinsi. Investasi Pemerintah terdapat dalam pos pengeluaran yang berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Berdasarkan teori di atas disimpulkan bahwa investasi pemerintah secara garis besar dapat diartikan sebagai penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu yang memiliki tujuan jelas. Investasi juga merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara dengan bertumbuhnya ekonomi suatu Negara maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Investasi Pemerintah menjadi sangat penting karena mampu memberikan ruang untuk dana pemerintah daerah bergerak secara mandiri untuk selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan cadangan pemerintah serta menjadi sumber pendapatan baru daerah.

2.1.5.2 Investasi Swasta

Menurut Buana, dkk (2018:13) pengertian investasi swasta dijelaskan sebagai berikut:

Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh motif pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA), investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri.

Salvatore (2014:109) menjelaskan Penanaman Modal Asing (PMA) terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Investasi portofolio (*portfolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
2. Investasi asing langsung (*foreign direct investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua Negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 lebih lanjut menjelaskan, hal-hal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT, yaitu mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Negara maju seperti Amerika Serikat, modal asing khususnya dari Jepang dan Eropa Barat tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi

domestik dan menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di Negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama untuk mencukupi kurangnya modal dalam negeri. Untuk itu, berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak swasta baik luar negeri maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi swasta memiliki peranan penting dalam kemajuan roda perekonomian Negara, seperti yang dicontohkan banyak Negara maju yang sudah sangat sentral dalam pengelolaan investasi swasta, investasi swasta juga terbagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA), investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Peran keduanya pun sangat penting untuk peningkatan kemajuan perekonomian Negara karena semakin banyaknya investasi swasta maka akan semakin meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Selain itu investasi swasta juga berperan penting guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik dan menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja yang hasilnya diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, apalagi di Negara berkembang seperti Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Buana, dkk (2019)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2015.	Independen: Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Dependen: Pertumbuhan Ekonomi.	1. Terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X1) dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Jawa. 2. Investasi Pemerintah (X2) tidak dianalisis lebih lanjut karena pada saat pengolahan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>data pengujian multikolinieritas terindikasi memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel Pengeluaran Pemerintah. Penulis Memutuskan mengeluarkan variabel investasi pemerintah dari model penelitian.</p> <p>3. Terdapat pengaruh Investasi Swasta (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Jawa.</p> <p>4. Terdapat pengaruh Tenaga Kerja (X4) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Jawa.</p> <p>5. Terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa.</p>
2	Wahyuni, dkk (2014)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan	<p>Independen: Pengeluaran Pemerintah dan Investasi</p> <p>Dependen: Pertumbuhan Ekonomi dan</p>	<p>1. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dengan Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>2. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kesenjangan Pendapatan	<p>3. Pengeluaran Pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap.</p> <p>4. Kesenjangan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesenjangan Pendapatan.</p> <p>5. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan.</p> <p>6. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2000-2012.</p>
3	Gusti, dkk (2017)	Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali	<p>Independen: Investasi Pengeluaran Pemerintah Tenaga Kerja</p> <p>Dependen: Produk Domestik Regional Bruto Tingkat Kemiskinan</p>	<p>1. Investasi (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), dan Tenaga Kerja (X3) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y1).</p> <p>2. Terdapat pengaruh dari Investasi (X1), dan Tenaga Kerja (X3) terhadap Kemiskinan (Y2).</p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				3. Pengeluaran Pemerintah (X2) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y2).
4	Bawinti, dkk (2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud	Independen : Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Dependen : Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. 2. Investasi Swasta secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud. 3. Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud.
5	Listriani (2019)	Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah, dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi	Independen : pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah. Investasi swasta Dependen : Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Investasi swasta berpengaruh positif terhadap

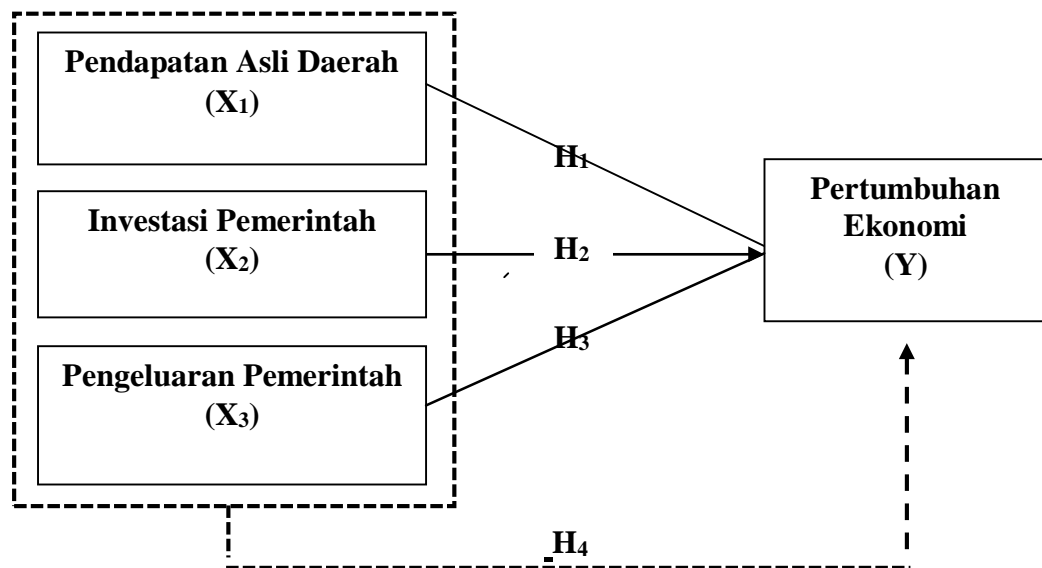
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				pertumbuhan ekonomi. 4. Pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah dan investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
6.	Afrizal dan Maulida (2011)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi	Independen: Pendapatan asli daerah Dana alokasi umum Dependen: Tingkat kemandirian daerah Pertumbuhan ekonomi	1. PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. 2. DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah 3. PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengertian kerangka penelitian menurut Sugiyono (2013:88) berpendapat bahwa “kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan”.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—→ : Pengaruh secara parsial

- - - → : Pengaruh secara simultan

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:64). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi.

2.4.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga

dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan asli daerah seharusnya terjadi peningkatan jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) yang berarti pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Hubungan Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 menjelaskan bahwa investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan Penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Investasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator Investasi Pemerintah terdapat pada pos pengeluaran yang berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Investasi pemerintah merupakan salah satu penunjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semakin tinggi tingkat investasi pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

H₂ : Investasi Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

“Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hal ini bertujuan untuk merangsang perekonomian suatu daerah” (Gathama, 2011:6). Pengeluaran dalam bentuk investasi memiliki peranan yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.

Menurut Mahmudi (2016:147) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya :

- a. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen non permanen. Investasi ini dapat berupa deposit berjangka, Pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, Penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.
- c. Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

Misalnya, dalam rangka pembangunan infrastruktur, pemerintah menggunakan dana cadangan dan/ atau dana penyertaan modal dan/ atau dana hasil pemberian pinjaman daerah. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa dan meningkatkan nilai perekonomian. Dengan demikian, semakin tinggi pengeluaran pemerintah seharusnya terjadi peningkatan jumlah produk domestik regional bruto diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

H₃ : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah wajib berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian secara umum, pemerintah berperan dalam mengendalikan dan mengatur perekonomian. Pemerintah harus mendorong dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat termasuk sektor swasta untuk berperan lebih besar dalam meningkatkan nilai konsumsi masyarakat. Dengan demikian, perekonomian yang lebih tinggi, adil dan merata dapat dicapai dengan lebih baik dan cepat. Pendapatan asli daerah

merupakan komponen penting keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengalokasian belanja sesuai prioritas pembangunan. Alokasi belanja yang baik tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator peningkatan jumlah PDRB. Selain pendapatan asli daerah, instrumen penting lain untuk menggerakkan perekonomian adalah investasi. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pengendalian atas suatu badan usaha dalam rangka melaksanakan kebijakan fiskal/publik, untuk memperoleh manfaat ekonomi, dan/atau manfaat sosial dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Indonesia juga membutuhkan peran pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen penting bagi pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN/APBD. Dengan demikian semakin tepat sasaran pengalokasian pendapatan asli daerah, investasi pemerintah dan pengeluaran pemerintah maka semakin meningkat pula tingkat pertumbuhan ekonomi.

H₄ : Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.